KEWAJIBAN HUKUM NEGARA PENERIMA TERHADAP KESELAMATAN DUTA BESAR: KASUS PENYERANGAN DUTA BESAR AMERIKA SERIKAT DI KOREA SELATAN

Oleh: Febe Jovita

NRP: 2130060

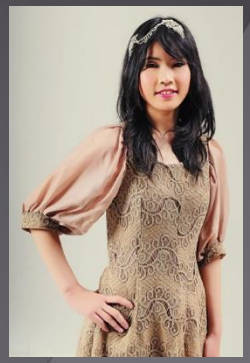

Latar Belakang Masalah

Menurut Boer Mauna, dalam bukunya Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menjelaskan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus dilakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya.

Latar Belakang Masalah

Namun adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban internasional untuk memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik tidak menjamin seluruh ketentuan tersebut terlaksana dengan baik, dalam dinamika hubungan diplomatik masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional maupun hukum diplomatik, terutama yang berhubungan dengan adanya kelalaian dan kegagalan suatu negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik yang ada di negaranya.

Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 9 September 2011 terjadi unjuk rasa besar-besaran di Negara Mesir yang menuntut reformasi dipercepat. Massa yang terdiri dari sekitar 1000 orang tersebut berjalan menuju Kedutaan Besar Israel dan melakukan penyerbuan di Kedutaan Besar Israel tersebut.

Latar Belakang Masalah

Menurut Syahmin AK dalam bukunya Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, setiap negara yang melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain akan memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan dari negara asing di negaranya.

Latar Belakang Masalah

Menurut Sumaryo Suryokusumo, Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu dengan membedakan sifat kekebalan dan keistimewaan itu sendiri. *Pertama*, kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu gugatnya diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya. *Kedua*, keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya dari kewajiban mereka membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial, dan perorangan. *Ketiga*, kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga dari segala perpajakan dari negara penerima.

Latar Belakang Masalah

Kekebalan suatu perwakilan diplomatik suatu negara berkaitan erat dengan imunitas negara *(state immunity)*, karena perwakilan diplomatik merupakan wakil dari suatu negara yang berdaulat. Dasar hukum kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik atau kedutaan besar, diberikan sebagai dasar dari perwujudan teori eksteritorialitas dan teori keterwakilan *(representative)*, dimana teori ekteritorialitas yang memberikan makna seakan-seakan gedung perwakilan atau kedutaan besar semacam perluasan dari wilayah negara pengirim dan teori keterwakilan yang melandasi kekebalan dan keistimewaan diartikan bahwa perwakilan diplomatik melambangkan negara pengirim karena perwakilan diplomatik/kedutaan besar melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi (misi diplomatik) dari negaranya di negara penerima.

Rumusan Masalah

Apa yang menjadi kewajiban negara penerima terhadap keselamatan duta besar asing?

Alasan Pemilihan Judul

Untuk meneliti perlindungan bagi duta besar di negara penerima dan pertanggungjawaban negara atas penyerangan terhadap duta besar terkait kewajiban negara penerima terhadap keselamatan duta besar asing dalam kasus antara Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Metode Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan atau data sekunder yang berupa konvensi-konvensi hukum internasional dan bahan kepustakaan lainnya seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, makalah, surat kabar, serta mengakses beberapa website melalui internet.

Tinjauan Umum tentang Konvensi Wina 1961

Menurut Edy Suryono dalam bukunya Perkembangan Hukum Diplomatik, Kovensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik terdiri dari 53 pasal. Ada 2 Optional Protokol yang menyertai konvensi tersebut, yaitu Optional Protokol mengenai perolehan kewarganegaraan dan Optional Protokol mengenai penyelesaian memaksa atas perselisihan.

Tinjauan Umum tentang Konvensi Wina 1961

Menurut T. May Rudy, Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari kepala perwakilan diplomatik (duta besar). Pasal 20-28 khusus mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk pembebasan berbagai pajak. Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan staf lain. Pasal 37-47 juga menyangkut kekebalan dan keistimewaan bagi para anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka. Pasal 48-53 berisi berbagai ketentuan mengenai penandatanganan aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya konvensi tersebut.

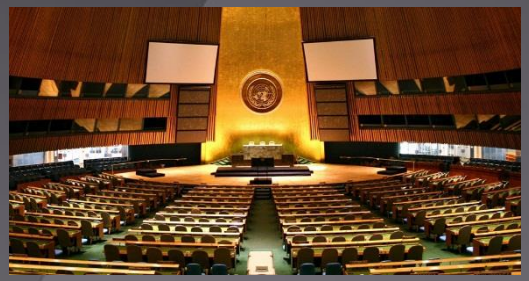

Tinjauan Umum tentang Konvensi Wina 1961

Menurut Jan Osmanczyk, hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan atau norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat, termasuk bentuk-bentuk organisasi dari dinas diplomatik.

Sebagai contoh, Vatikan baru bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel setelah tercapai kesepakatan Oslo antara Israel dan Palestina tahun 1993.

Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Menurut Boer Mauna, dalam bukunya Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Teori Dasar Pemberian Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Diplomatik:

1. Teori Eksteritorialitas.
2. Teori Representatif.
3. Teori Kebutuhan Fungsional.

Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Mulai dan berakhirnya Duta Besar menikmati Hak Kekebalan dan Keistimewaan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina 1961.

Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Menurut Oppenheim, ada 3 kemungkinan kapan seorang dubes menikmati hak kekebalan, yaitu:

1. Pada saat ia diterima (disetujui) sebagai dubes di negara penerima.
2. Pada saat *formal reception* oleh kepala negara dari negara penerima.
3. Pada saat ia memasuki wilayah teritorial dari negara penerima.

Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Berakhirnya hak keistimewaan dan kekebalan adalah pada saat:

1. Telah berakhirnya tugas dari pejabat diplomatiknya telah berakhir (Pasal 43 (a)), atau karena negara penerima melayangkan *persona non grata* sesuai dengan pasal 9 ayat 2 (Pasal 43 (b)) Konvensi Wina 1961.
2. Apabila pejabat diplomatik tersebut melakukan pelanggaran seperti pada Pasal 13 Konvensi Wina 1961, yang menyebabkan pemerintah negara penerima meminta pemerintah negara pengirim untuk mencabut haknya.
3. Apabila pemerintah dari negara pengirim menanggalkan hak keistimewaan dan kekebalan dari diplomatnya (Pasal 32 Konvensi Wina 1961).

Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Sebagai contoh, Dubes Rumania di Swiss, di mana ia belum menyerahkan surat kepercayaan kepada kepala negara, ia terlibat sebuah kejahatan. Pengadilan Swiss menganggap bahwa yang bersangkutan belum menikmati hak kekebalan karena ia belum menyerahkan surat kepercayaan kepada kepala negara. Oppenheim tidak sependapat karena ini menyangkut hak untuk tidak diganggu gugat dan keselamatan. Menurutnya, ketika yang bersangkutan telah diterima (disetujui) sebagai dubes, maka hak kekebalan tersebut mulai dinikmati dan keberadaan Pasal 40 Konvensi Wina 1961.

Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Menurut Sumaryo Suryokusumo, macam-macam Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Pejabat Diplomatik, yaitu:

1. Kekebalan dan Keistimewaan Diri Pribadi.
2. Kekebalan dan Keistimewaan Anggota Keluarga Pejabat Diplomatik.
3. Kekebalan Kantor Perwakilan Asing dan Tempat Kediaman Seorang Wakil Diplomatik.

Kekebalan dan Keistimewaan Diri Pribadi

- Pasal 9 Konvensi Wina 1961.
- Pasal 29 Konvensi Wina 1961.
- Pasal 34 Konvensi Wina 1961.
- Pasal 36 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina 1961.
- Pasal 33 Konvensi Wina 1961.
- Pasal 35 Konvensi Wina 1961.
- Penjelasan atas Undang-undang No. 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963.

Kekebalan dan Keistimewaan Diri Pribadi

Sebagai contoh, pada pertengahan Desember tahun 2013, seorang perwakilan diplomatik dari India untuk Amerika Serikat bernama Devyani Khobragade diborgol dan digeledah pakaiannya oleh Kantor Jaksa Federal Amerika Serikat (AS) dengan tuduhan penipuan visa dan membayar upah dibawah batas upah minimum kemudian dihadirkan dalam sidang pengadilan Manhattan pada tanggal 13 Desember 2013 dengan putusan dibebaskan dengan jaminan.

Sumber: BBC.

Kekebalan dan Keistimewaan Anggota Keluarga Pejabat Diplomatik

Ketentuan mengenai kekebalan bagi keluarga pejabat diplomatik diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961.

Sebagai contoh kasus yang terjadi, berawal dari gugatan yang diajukan oleh seorang warga negara Filipina bernama Corazon Tabion, yang merupakan pembantu rumah tangga bagi pasangan suami istri Yordania, Faris dan Lana Mufti. Faris Mufti adalah seorang pejabat konsuler Yordania untuk Distrik TS Ellis Amerika Serikat. Gugatan diajukan Tabion pada bulan Februari tahun 1996 ke Pengadilan Distrik TS Ellis Amerika Serikat. Mufti menyatakan bahwa ia dan istrinya tidak dapat digugat karena ia memiliki kekebalan diplomatik sebagai seorang pejabat diplomatik, sehingga pengadilan Distrik TS Ellis Amerika Serikat menghentikan proses kasus ini.

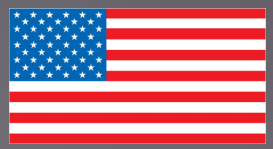

Kekebalan Kantor Perwakilan Asing dan Tempat Kediaman Seorang Wakil Diplomatik

- Pasal 22 Konvensi Wina 1961.
- Pasal 30 Konvensi Wina 1961.
- Contoh: pada tanggal 4 November 1979, ratusan pelajar dan para pendemo lain mengambil alih Kedutaan Besar AS di Teheran secara paksa. Dalam putusan sebelumnya, pengadilan telah menunjukkan langkah-langkah sementara atas permintaan AS dalam putusan, pengadilan memutuskan pada permintaan AS bagi sebuah deklarasi bahwa Iran melanggar sejumlah perjanjian, termasuk Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 tentang diplomatik dan hubungan konsuler.

Kewajiban Negara Penerima terhadap Pejabat Diplomatik Asing

Menurut Syahmin AK dalam bukunya Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, Ada 3 hal yang harus dijamin terkait dengan perlindungan fisik, yaitu:

- *Inviolability of the premises.*
- *Personal inviolability.*
- *Freedom of movement.*

Inviolability of the premises

- Pasal 22 Konvensi Wina 1961.
- Pasal 24 Konvensi Wina 1961.
- Pasal 45 Konvensi Wina 1961.
- Menurut Prof. Sumaryo Suryokusumo, dalam bukunya Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus menyatakan bahwa ada istilah *externa ratione* dan *interna ratione* dalam perlindungan terhadap premises.
- Contoh, penembakan ke Kedutaan Besar AS di Sarajevo pada Oktober 2011. Pengadilan Negeri Bosnia yang dipimpin hakim Branko Peric menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun terhadap Mevlid Jasarevic (tersangka) karena serangan bersenjata terhadap kedubes AS.

Personal Inviolability

- Pasal 29 Konvensi Wina 1961.
- Menurut Henry Cambell Black (Black's Law Dictionary), setiap perwakilan diplomatik di negara penerima *(receiving state)* berhak mendapat perlakuan secara hormat dan negara penerima harus mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya, maupun martabatnya, dengan kata lain bahwa wakil diplomatik harus dilindungi dari segala macam hal yang mengancamnya.
- Pasal 30 Konvensi Wina 1961.
- Pasal 31 Konvensi Wina 1961.
- Contoh: Duta Besar Amerika untuk Libya dan tiga staf kedutaan tewas setelah para demonstran menyerbu konsulat Amerika di Benghazi pada 11 September 2012.

Abu Khatallah

Jaksa Agung Pengadilan Federal di Washington DC Loretta Lynch memutuskan terdakwa menghadapi hukuman seumur hidup.

Freedom of movement

- Pasal 26 Konvensi Wina 1961.
- Pasal 41 Konvensi Wina 1961 ayat (1) dan ayat (3).
- Pasal 26 Konvensi Wina 1969.
- Pasal 27 Konvensi Wina 1969.
- Pasal 46 Konvensi Wina 1969.
- Contoh: Teheran Case (Amerika Serikat vs Iran) dimana menghasilkan 6 intisari putusan hakim Mahkamah Internasional.

Pertanggungjawaban Negara

Menurut Oppenheim penyebab timbulnya pertanggungjawaban negara dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Original Responsibility.*
2. *Vicarious Responsibility.*

Menurut Huala Adolf, ada dua prinsip pertanggungjawaban negara yang menentukan tanggung jawab suatu negara dapat dipersalahkan atau tidak, yaitu:

1. Prinsip pertanggungjawaban objektif (Teori Risiko).
2. Prinsip pertanggungjawaban subjektif (Teori Kesalahan).

Pertanggungjawaban Negara

Dalam ketentuan Pasal 34 *draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, dijelaskan bahwa pemulihan *(reparation)* terhadap kerugian dapat berupa restitusi *(restitution)*, kompensasi *(compensation)*, dan pemenuhan *(satisfaction)*.

Pertanggungjawaban Negara

Bentuk pertanggungjawaban negara penerima atas penyerangan terhadap duta besar asing dapat dilakukan dengan:

a. Restitusi (Pasal 35 *draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*).
b. Kompensasi (Pasal 36 *draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*).
c. Pemuasan (Pasal 37 *draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*).

Pertanggungjawaban Negara

Upaya-upaya penyelesaian sengketa internasional menurut Piagam PBB Pasal 33 bab VI tertulis: “pihak-pihak yang tersangkut dalam pertikaian dan jika berlangsung terus menerus dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalur perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.”

Pertanggungjawaban Negara

Contoh praktek tanggung jawab negara dalam kasus *Amerika Serikat vs Republik Rakyat Cina* bahwa pemerintah Amerika Serikat atas perbuatannya telah menyesal dan meminta maaf atas serangan udara yang dilakukannya sehingga menghancurkan Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Beograd dan melakukan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian sebanyak 28 milliar US Dollar yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Kronologi Kasus

Penyerangan yang dilakukan terhadap Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan, Mark Lippert pada 5 Maret 2015 oleh seorang pria misterius bernama Kim memang membuat suasana antara kedua negara tegang. Kabarnya, pelaku penyerangan tak setuju dengan latihan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Kronologi Kasus

Saluran berita Korea Selatan melaporkan bahwa Lippert diserang saat akan menyampaikan pidatonya dalam pertemuan sekaligus sarapan pagi di Sejong Hall di Seoul. Laporan mengatakan bahwa tak ada hal yang spesifik, selain terdengar teriakan dan kemudian duta besar yang berlumuran darah diantar ke rumah sakit.

Kronologi Kasus

Yonhap melaporkan bahwa tersangka muncul dari belakang lalu mendorong Lippert di atas meja dan mulai menyerang sang duta besar di bagian pipi kanan dan bagian tangan kirinya dengan sebuah pisau sepanjang 10 inci.

Analisis Kasus

Korea Selatan harus melindungi wakil diplomatik dari segala macam hal yang mengancamnya, dan Korea Selatan lalai untuk memenuhi pencegahan serangan terhadap badan, kebebasan, dan martabat dari perwakilan diplomatik. Oleh karena itu Korea Selatan melanggar Pasal 29 Konvensi Wina 1961, yaitu setiap perwakilan diplomatik di negara penerima *(receiving state)* berhak mendapat perlakuan secara hormat dan negara penerima harus mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya, maupun martabatnya.

Kewajiban Korea Selatan

Kewajiban Korea Selatan terhadap keselamatan duta besar asing sehubungan dengan 3 hal yang harus dijamin terkait dengan perlindungan fisik sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961, yakni:

- *Inviolability of the premises* (Pasal 22, 24, 45)
- *Personal inviolability* (Pasal 29, 30, 31)
- *Freedom of movement* (Pasal 26, 41 ayat (1) & (3); Pasal 26, 27, 46 Konvensi Wina 1969)

Pertanggungjawaban Korea Selatan

Pertanggungjawaban Korea Selatan diatur sebagaimana dalam *draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, yaitu:

- dengan restitusi dengan cara menjamin perlindungan terhadap premises baik *externa ratione* ataupun *interna ratione*,
- dengan kompensasi dengan cara membiayai pengobatan korban hingga pulih,
- dengan pemuasan dengan cara permintaan maaf, dan
- mengadili pelaku penyerangan dengan dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun.

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat terkait dengan kasus ini yaitu dengan cara negosiasi saja sudah cukup karena antara kedua negara tidak merasa adanya intimidasi dan masih akan tetap menjalin hubungan baik antara kedua negara tersebut.

Kesimpulan

Korea Selatan melanggar ketentuan Pasal 29 Konvensi Wina 1961.

Kesimpulan

Kewajiban Korea Selatan terhadap keselamatan duta besar asing sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961, yakni:

- *Inviolability of the premises.*
- *Personal inviolability.*
- *Freedom of movement.*

Kesimpulan

Pertanggungjawaban Korea Selatan:

- dengan cara menjamin perlindungan terhadap premises baik *externa ratione* ataupun *interna ratione*,
- dengan cara membiayai pengobatan korban hingga pulih,
- dengan cara permintaan maaf, dan
- mengadili pelaku penyerangan dengan dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun.

(Sebagaimana diatur dalam *draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*).

Saran

Hendaknya Pemerintah Korea Selatan sebagai negara penerima perwakilan diplomatik dari Amerika Serikat:

- meningkatkan keamanan guna menjaga dan melindungi seorang perwakilan diplomatik yang ada di negaranya, dan
- melakukan penjagaan yang lebih ketat, baik di dalam maupun di luar gedung perwakilan diplomatik.

LAW

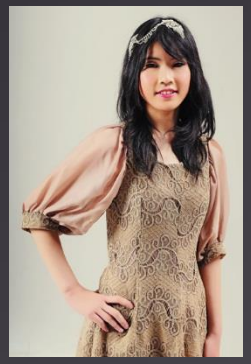

Thanks for your attention